**ABSTRAK**

 Penelitian ini berjudul “**Kinerja Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau**”. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBBP2) dan Perkotaan karena merupakan sumber utama pendapatan negara untuk keberlangsungan peningkatan pembangunan di Indonesia. Pengelolaan PBBP2 menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan pajak bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja dari kepala badan BPPRD dalam mengatasi permasalahan pengelolaan PBBP2 serta meneliti faktor yang menghambat penerimaan PBBP2, dan upaya yang dilakukan kepala badan BPPRD untuk meningkatkan penerimaan PBBP2.

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

 Hasil magang yang diperoleh bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk penerimaan daerah, salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajibannya membayarkan PBBP2, sistem pembayaran yang masih konvensional serta sulitnya masyarakat untuk menjangkau tempat pembayaran karena ada yang terpisahkan oleh pulau - pulau. Kemudian masih terdapat data PBBP2 yang tidak *valid* dan perlu untuk dilakukan pemutakhiran, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penetapan dan penilaian pajak mengakibatkan proses pemutakhiran masih belum maksimal. Belum adanya standar operasional prosedur yang mendukung untuk pengelolaan PBBP2. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Bintan masih banyak memiliki permasalahan, dan perlunya upaya peningkatan kinerja yang lebih baik serta peningkatan sosialisasi yang lebih inovatif terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pemutakhiran, Pajak, Penerimaan.

***ABSTRACT***

This study is titled “**The Ability of Regional Chief Tax and Retribution Management Agency in Improving Entrance for Land Tax and Rural and Urban Buildings in Bintan Regency, Kepulauan Riau Province**”. Tax is obligatory fee that should be paid by people of Indonesia as a tax payer, one of it is Land Tax and Rural and Urban Buildings because it’s the main state income for sustainability of development improvement Indonesia. The management of is Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBBP2) become the most obstacle on tax management for all local governments in Indonesia including Bintan Regency. This study is to know how the capability of regional chief Tax and Retribution Management Agency (BPPRD ) in overcoming the problem of management in Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBBP2) and an efforts made by the chief of local tax and retribution management agency to increase the entrance for Land Tax and Rural and Urban Buildings.

 The method used by this study is qualitative, descriptive with an inductive approach method . the Techniques of data collection is with observation, interview, and documentation. Techniques of data analysis comprise data reduction, data presentation and draw conclusion.

The study results obtained that the management of is Land Tax and Rural and Urban Buildings still has not given maximum results for local revenue. The one of problem faced is still the realization for people obligation payment of Land Tax and Rural and Urban Buildings, the conventional payment system, and the difficulty of the community to reach the place of payment because the separated island. Then still on the invalidity Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBBP2) that should be renewed and less of human resources to set and assessment the tax value have still yet optimal. There is no standard operational procedures that support management for Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBBP2). It show that the management of Land Tax and Rural and Urban Buildings in bintan regency still has problems and should increase the efforts for good improvements and increased innovative socialization of the community.

Keywords: Updating, Tax, Reception